

**SEKOLAH SEBAGAI ALAT POLITIK
(Telaah terhadap Persoalan Pendidikan di Indonesia)**

Azizah Hanum OK

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN-SU Medan

Abstrak

Tidak berlebihan bila ada statement “Pendidikan merupakan *soft power*”, kekuatan sejati yang tidak terlihat secara kasat mata tetapi semua orang membutuhkan dan turut merasakan kekuatannya. Pendidikan memberikan kontribusi dan pengaruh politis yang amat besar dalam tatanan kehidupan manusia. Karena itu jangan jadikan pendidikan sebagai alat politik. Pendidikan yang ideal tentu akan melahirkan manusia ideal. Manusia yang sehat, berpendidikan dan berakhlak baik merupakan manusia ideal yang diharapkan akan mampu mengambil peran dan mendidikasikan dirinya untuk mengubah pendidikan menjadi media berpolitik adiluhung atau politik yang beriman dan berbudi pekerti luhur dan sekaligus mampu mendidik politik lewat pendidikan. Pendidikan politik dan politik pendidikan seharusnya tidak saling bermusuhan akan tetapi dapat saling berintegrasi dan berinterkoneksi. Harapan ini diharapkan dapat diwujudkan oleh lembaga pendidikan yang bernama sekolah.

Akan tetapi jika sekolah masih diposisikan sebagai alat politik, maka pendidikan politik bagi generasi muda di negeri ini akan mengalami penurunan kualitas dan bahkan mungkin lebih parah lagi. Kebebasan memilih pendidikan yang berkualitas tanpa dibebani biaya yang mahal adalah salah satu harapan di samping peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang berkualitas harus tersebar di seluruh penjuru agar mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Kata kunci: Sekolah, Pendidikan, Alat politik

Pendahuluan

Dalam sebuah buku yang judulnya sangat provokatif, Everett Reimer menyatakan bahwa “*School is dead*” *Most of the children of the world are not in school. Most of those who enter drop out after a very few years. Most of those who succeed in school still become dropouts at a higher level*” Sistem kelembagaan pendidikan membuat banyak anak di dunia tidak dapat menikmati pendidikan. Kalaupun mereka memperolehnya, maka akhirnya anak-anak itu akan *drop-out*. Secara sederhana buku ini memberikan pandangan dan wawasan

yang radikal serta sama sekali berbeda dengan pandangan umum. Setiap orang pastilah berpandangan kalau sekolah adalah penting dan merupakan investasi masa depan. Tidak ada masa depan tanpa sekolah. Bahkan Hadis “tuntutlah ilmu dari ayunan sampai keliang lahat” dijadikan dasar untuk terus bersekolah.

Keyakinan untuk “bersekolah” yang tertanam di benak kebanyakan orang di dunia ini tentunya tidaklah salah, bila yang dimaksudkan dengan bersekolah mengikuti proses pendidikan untuk menjadi manusia yang terdidik. Keyakinan ini bahkan disosialisasi melalui berbagai media dan kesempatan dari lembaga pendidikan formal hingga non formal untuk membentuk pandangan umum tentang perlunya sekolah.

Namun di sisi lain ternyata sekolah tempat di mana manusia akan dididik menjadi *insan kamil* sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas manusia, ternyata dalam praktiknya mengalami pergeseran fungsi. Sekolah tidak lagi murni sebagai tempat untuk memanusiasikan manusia, tempat untuk membentuk kepribadian dan akhlak mulia, akan tetapi sekolah juga merupakan alat yang digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan, tempat untuk membentuk sikap, keyakinan politik, dan ideologi yang dikehendaki oleh penguasa, tempat untuk mempersiapkan lapangan pekerjaan, tempat untuk menyekat antara si miskin dan si kaya, atau tempat untuk mempromosikan kebaikan hati pemerintah.

Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan sisi lain dari fungsi sekolah, yaitu sekolah sebagai alat politik.

Tujuan dan Fungsi Sekolah

Apa sesungguhnya sekolah? Sekolah oleh Everett Reimer (Reimer: 1987, h. 25) didefinisikan sebagai *‘lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum-kurikulum yang bertingkat. Alternatif lain dalam pendidikan mestinya bergerak menjauh dari stereotipe tersebut.*

Apa sesungguhnya yang diharapkan dari sekolah? Tentu jawabannya beragam. Ada yang berharap bahwa sekolah sebagai tempat mengembangkan

potensi diri, tempat yang dapat melatih seseorang untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Ada juga yang pergi ke sekolah sekedar ikut-ikutan, karena teman-teman seusianya pergi ke sekolah, untuk mengisi waktu luang atau hanya karena tuntutan orangtua. Bahkan tidak sedikit yang menganggap sekolah hanya tempat untuk mendapatkan ijazah.

Jadi idealnya apa yang menjadi tujuan dari lembaga pendidikan sekolah? Membahas tentang tujuan lembaga pendidikan sekolah, sesungguhnya juga membahas tentang tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Lembaga pendidikan sekolah sesuai dengan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini berarti lembaga pendidikan sekolah mempunyai tujuan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia yaitu, mulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap ajaran agama dan pengetahuan umum, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan afeksi, yaitu terjadinya proses internalisasi ajaran, nilai agama dan pengetahuan ke dalam diri siswa, dalam arti menghayati dan menyakininya. Melalui tahapan afeksi tersebut diharapkan dapat tumbuh motivasi dalam diri siswa dan bergerak untuk mengamalkan dan menaati ajaran, nilai agama dan pengetahuan (tahapan Psikomotorik) yang telah diinternalisasikan dalam dirinya. Dengan demikian, akan terbentuk manusia Indonesia yang bertakwa dan berakhlak mulia.

Demikianlah tujuan sekolah, sehingga semua orang menganggap dan berharap bahwa sekolah adalah benar-benar sebagai tempat mendidik orang. Karenanya sejak anak lahir, bahkan ketika masih dalam kandunganpun orang tua sudah berpikir tentang tempat di mana ia akan menyekolahkan anaknya. Begitulah, pesona sekolah, sehingga ia menjadi sebuah keharusan sekaligus sebagai sebuah harapan dalam hidup.

Pendidikan sekolah pada dasarnya merupakan lanjutan dari pendidikan keluarga, hanya saja pendidikan di sekolah diperoleh secara teratur, sistematis,

bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Sehingga pendidikan sekolah sangat penting fungsi dan peranannya terhadap keberhasilan pendidikan anak.

Fungsi dan peranan pendidikan sekolah itu antara lain:

- Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan anak didik
- Spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran
- Efisiensi. Pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis, juga jumlah anak didik dalam jumlah besar akan memberikan efisiensi bagi pendidikan anak dan juga bagi orang tua.
- Sosialisasi, yaitu proses perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan masyarakat.
- Konservasi dan transmisi kultural, yaitu pemeliharaan warisan budaya. Dapat dilakukan dengan pencarian dan penyampaian budaya pada anak didik selaku generasi muda.
- Transisi dari rumah ke masyarakat. Sekolah menjadi tempat anak untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab anak sebagai persiapan untuk terjun ke masyarakat.

Dari point-point di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah merupakan sebuah lembaga sosial yang mempunyai peran penting dalam mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai, mengembangkan potensi, mempertahankan, menyeimbangkan dan menciptakan sebuah kebudayaan terdahulu agar sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman yang semakin kompleks. Dengan demikian fungsi sekolah adalah sebagai lembaga sosialisasi, alat transformasi dan transmisi kebudayaan.

Sekolah Sebagai Alat Politik

Pendidikan telah mengalami proses formalisasi sekolah, dan hanya sekolah yang mendapatkan legitimasi dari negara untuk menyelenggarakan proses pendidikan. Dengan sistem sekolah ini membuat banyak orang “salah tafsir” terhadap pendidikan. Pendidikan disamakan dengan sekolah dengan pengertian yang sempit. Akreditasi, pakaian seragam, ujian nasional, pembangunan fisik,

dan program pendidikan lainnya selalu dilekatkan pada lembaga formal yang bernama “sekolah”. Ironinya nasib seseorang termaktub dalam selembar kertas suci yang berlabel ijazah, walau diketahui ijazah tersebut diperoleh lewat “*jalan tol*” (aspal).

Ketidakjelasan dan kesalahan dalam menafsirkan makna sekolah, membuat orientasi sekolah hanya untuk proyek investasi. Sekolah menjadi alat untuk mencari posisi dan kedudukan belaka. Demi logika ini proses untuk mengantarkan siswa kepada kesadaran akan pentingnya ilmu dan kedewasaan tidak lagi menjadi orientasi yang mendasar. Fenomena ini akhirnya menjadikan sekolah sebagai suatu barang mewah dan mahal. Sekolah dijadikan sebagai ladang bisnis baru yang sangat menjanjikan. Mengapa? Karena bisnis pendidikan sangat menjanjikan bagi bangsa yang gila gelar. (Benny Susetyo: 2005, 116).

Lantas, jika pendidikan terjerembab ke dalam dunia bisnis, tentu akan berlakulah teori siapa yang punya uang dia akan bisa membeli pendidikan.

Sekolah dengan desain politik seperti ini telah merebut kebebasan dan kemanusiaan. Sekolah tidak lagi sebagai wadah untuk humanisasi tetapi lebih cenderung sebagai tempat penyediaan lapangan kerja, perdagangan ilmu (ijazah), dan praktik kapitalisme dan kolonialisme baru. Sekolah yang dijadikan sebagai alat politik dapat diamati dari kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Pemimpin politik atau pemerintah menyadari fungsi pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Karenanya menurut Sirozi, pemerintah melakukan berbagai cara untuk mengontrol sistem pendidikan dan menitipkan pesan-pesan politik melalui metode dan bahan ajar (*curriculum content*) pendidikan. (Sirozi: 2010, 39) Dalam tulisan ini penulis akan membahas beberapa kebijakan pemerintah dari zaman Orde Baru hingga sekarang ini yang mengisyaratkan bahwa pendidikan dijadikan sebagai alat politik. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah:

- a) Pendidikan di masa Orde Baru dijadikan pemerintah sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan atau status quo dengan golkarisasi semua elemen pemerintah, yaitu semua pegawai negeri, termasuk guru dan dosen. Semua pegawai negeri secara otomatis menjadi anggota Korps

Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) yang menjadi alat pemersatu seluruh pegawai negeri dalam satu organisasi, sehingga seluruh pegawai negeri tidak diperkenankan untuk tergabung dalam organisasi lain. Kebijakan ini tentu saja mempunyai tujuan politik yaitu agar pada pemilu berikutnya memilih Golkar.

Rezim Orde Baru menjadikan pendidikan sebagai instrumen melanggengkan kekuasaan mereka lewat indoktrinasi politik. Karenanya semua unsur seperti kepala sekolah dan guru dalam melakukan tugas tidak lagi mendasarkan pada profesionalitas, akan tetapi pada arahan, instruksi, serta petunjuk. Sekolah bukan lagi wahana yang bersifat demokratis akan tetapi tempat yang anti demokratis. Bagaimana mungkin tempat seperti ini akan dapat melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis. Pemimpin-pemimpin hari ini sebagiannya adalah produk didikan masa orde baru, walau tentu saja tidak semua pemimpin sekarang ini tidak baik.

- b) Untuk memasuki suatu lapangan pekerjaan, terutama untuk menjadi PNS sebagai “abdi negara” (katanya), yang diperhitungkan adalah selebar kertas yang bernama ijazah. Penulis bukannya tidak setuju dengan seleksi atau rekrutmen melalui ijazah, tetapi harusnya proses untuk mendapatkan ijazah tersebut jauh lebih penting dibandingkan dengan ijazah itu sendiri. Tetapi kenyataannya, hari ini ijazah yang diperoleh melalui ujian “bohong-bohongan”, atau ijazah sarjana dari Perguruan Tinggi “*Antah-berantah*” (ijazah asli tapi palsu), tetap mendapat peluang yang sama atau bahkan mereka mendapat prioritas karena punya relasi dan koneksi dengan pemegang kekuasaan.

Keberatan dan kritikan yang diajukan oleh berbagai pihak kepada pemerintah khususnya kepada menteri pendidikan dan kebudayaan, sepertinya kurang efektif dan cenderung tidak membuahkan hasil. Mata mereka seakan buta dan telinga seakan tuli, sehingga diskusi, debat, seminar dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan di berbagai media dan kesempatan kurang memberikan pengaruh, terbukti dengan berbagai alasan UN “bohong-bohongan” berlangsung dalam waktu yang cukup

lama bahkan tetap juga berlangsung sampai saat ini walau harus diakui bahwa upaya untuk memperbaiki sistem UN ini terus dilakukan.

Kalaulah sekolah hanya untuk mendapatkan ijazah, dan ijazah merupakan selembar kertas sakti yang menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan prestisius, tentunya terlalu lama waktu yang dijalani (hingga mencapai minimal 16 tahun) serta terlalu mahal biaya yang dihabiskan. Padahal untuk melatih tenaga kerja yang siap pakai kita cukup memasukkannya kursus dalam waktu yang relatif singkat, katakanlah dua atau tiga tahun. Dua atau tiga tahun merupakan waktu yang cukup untuk melatih seseorang agar memiliki keterampilan yang mumpuni dalam bidang apa saja. Bila asumsi ini benar maka pendapat yang menyatakan bahwa “*sekolah tiak perlu*” Susah untuk dibantah.

- c) Mahalnya biaya sekolah. Di negeri ini sekolah bermutu membutuhkan banyak biaya. Mengapa sekolah mahal?, sebab sekolah laksana proyek investasi masa depan. Demi masa depan anak orang tua akan mempertaruhkan segalanya. Orang tua sangat khawatir bila anaknya tidak lulus untuk masuk ke sekolah favorit yang memiliki mutu standar. Mentalitas seperti ini dimanfaatkan oleh penyelenggara pendidikan/sekolah favorit tersebut untuk memahalkan dan mempermainkan biaya kompensasi pendidikan dengan membuat nama uang pembangunan, uang gedung dan lain sebagainya. Padahal Permendikbud Nomor 75 Tahun 2015 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016 sudah sangat *clear*, bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Ironisnya masyarakat/orang tua akan rela membayar dan seakan tidak punya pilihan lain.

Mengapa harus membayar uang pembangunan, padahal pembangunan sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah. Pertanyaan ini selalu saja tidak terjawab, yang membuat orang tua, terutama golongan

ekonomi kelas bawah semakin tertekan. Belum lagi dengan keharusan membeli setumpuk buku, dan orang tua merasa harga buku yang harus dibeli menjadi lebih mahal. Mahalnya biaya sekolah ini membuat banyak anak di Indonesia tidak dapat menikmati bangku sekolah. Kenyataannya semakin banyak anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk sekolah dengan semestinya, karena alasan kemiskinan. Namun di tengah kemewahan yang ditunjukkan oleh sebagian para penguasa, percayakah kita bila ada anak Indonesia yang tidak dapat pergi ke sekolah dikarenakan tidak mampu membeli seragam?. Maka bila banyak anak yang putus sekolah karena persoalan dana maka patut diduga ada yang salah pada negara dalam melaksanakan roda pemerintahannya.

Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk sekolah mengundang sinisme dari berbagai pihak. seperti “*Sekolah itu candu*” karya Roem Topatimasang, “*Orang miskin dilarang sekolah*” karya Eko Prasetyo, “*Sekolah dibubarkan saja!*” karya Afdhillah, “*School is Dead*” karya Everett Reimer, “*Pedagogy of Opressed*” karya Paulo Fraire dan lain-lain. Semua karya ini lahir berawal dari kegelisahan para penulisnya yang menyaksikan institusi pendidikan yang bernama sekolah menjadi lembaga yang hanya dapat dijamah oleh orang-orang “berkantong tebal”.

Selain itu kemunculan tokoh-tokoh tersebut secara historis di dorong oleh kondisi krisis pendidikan yang terjadi di seluruh dunia. Krisis ini dipicu oleh beberapa variabel yang berskala internasional, yakni: perubahan ekonomi internasional, lahirnya instabilitas politik, dan perubahan demografi. (Coombs: 1985, 9-14)

Karena itu, banyaknya kritikan yang diarahkan kepada sistem lembaga pendidikan atau persekolahan hendaknya menggugah nurani pengambil kebijakan (pemerintah) untuk mendesain suatu pendidikan yang relevan dengan kebutuhan rakyat. Tidak seperti yang terjadi selama ini, pendidikan nasional sudah lebih dari 60 tahun diarahkan oleh ideologi penguasa dan bukan untuk kepentingan rakyat. (Teguh Wiyono: 2010, 202)

Kebijakan tentang pembelian buku kurikulum 2013. Buku kurikulum 2013 yang meliputi Buku teks pelajaran dan buku panduan guru juga ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ironinya lagi pembelian buku oleh sekolahpun diatur oleh peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permen Dikbud no 34 tahun 2014. Dalam peraturan menteri ini ditetapkan bahwa penyedia buku adalah pemenang lelang buku kurikulum 2013 yang melakukan kontrak payung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Permendikbud No. 34 tahun 2014, Bab I, Pasal I). Bahkan pada bab II pasal 2 ditegaskan bahwa Sekolah tidak diperbolehkan membeli buku kurikulum 2013 selain buku yang disediakan oleh pihak penyedia buku yang menjadi pemenang lelang yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengapa buku kurikulum 2013 harus pemerintah yang menetapkannya?, dan mengapa pula yang menyediakan buku tersebut harus pemenang lelang yang ditetapkan oleh jasa pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)? Mengapa tidak diserahkan saja kepada pihak swasta untuk mengelola ini? Boleh jadi kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Karena sosialisasi politik menurut Sirozi diperlukan, baik untuk mempertahankan maupun untuk menggerogoti kekuasaan. (Sirozi: 2010, 45) Selain itu sekolah dengan berbagai perangkatnya; kurikulum, buku-buku teks, metode pengajaran, organisasi-organisasi yang ada di sekolah, lingkungan kelas, siswa, guru, struktur administrasi dan lain-lainnya, bisa saja secara eksplisit maupun implisit terkait dengan transmisi orientasi politik dasar terhadap lingkungan. (Sirozi: 2010, 44)

- d) Kebijakan tentang bidang apa saja yang terbuka untuk perdagangan bebas. Dalam peraturan presiden No. 77 tahun 2007 termuat pendidikan sebagai bidang yang dapat dimasuki oleh modal asing. Mengapa pendidikan termasuk kepada bidang yang dapat dimasuki oleh modal asing? Walau dalam kebijakan ini ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para

penanam modal. Tapi apakah ada garansi bahwa penanam modal (asing) itu tidak memiliki pretensi apa-apa? Apakah “orang bule” itu akan peduli dengan kepentingan bangsa dan dapat menjaga rasa nasionalisme? Bukankah pendidikan merupakan bidang yang sangat sensitif di dalam menjaga kepentingan suatu bangsa? (Teguh Woyono: 2010, 104) Apakah mereka peduli dengan tujuan pendidikan nasional agar peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa, memiliki akhlak mulia, punya kompetensi unggulan sehingga ia dapat berpartisipasi untuk memajukan peradaban Indonesia yang berkeadaban?. Secara institusional, sekolah yang dibiayai oleh modal asing belum mampu membuat visi dan orientasi yang berpihak kepada rakyat, akan tetapi berpihak pada kepentingan investasi modal.

- e) Pendidikan Gratis. Dalam realitas seringkali dinyatakan adanya pendidikan gratis. Tetapi, apakah benar ada sekolah yang gratis? Karena kenyataannya, buku penunjang pelajaran, les, kegiatan ekstrakurikuler, seragam, sepatu, biaya-biaya non-SPP, biaya karya wisata tetap saja harus bayar. Jika jarak tempuh antara rumah dengan sekolah cukup jauh, maka harus ada biaya transportasi.

Pendidikan murah dan gratis adalah pandangan yang bertentangan dengan kenyataan, hanya *lips service*. Tanpa sosialisasi yang benar, bisa jadi banyak rakyat meyakini sekolah gratis benar-benar gratis, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Padahal sekolah gratis yang dimaksud adalah hanya pembebasan dari biaya SPP. Karena sekolah dijadikan sebagai alat politik maka slogan pendidikan gratis merupakan slogan yang sangat sering diucapkan pada masa-masa kampanye, baik kampanye pemilihan legeslatif ataupun kampanye pemilihan presiden. Pendidikan gratis merupakan angin surga, terutama bagi rakyat miskin. Pendidikan gratis merupakan slogan untuk menarik simpati rakyat, agar pada saatnya memilih mereka untuk menduduki kursi-kursi empuk dan basah.

- f) Menjamurnya sekolah-sekolah yang mengajukan label sekolah berstandar internasional (SBI) dan sekolah rintisan berstandar internasional (SRBI)

baik negeri maupun swasta. Padahal program ini tentunya menguras dana yang tidak sedikit. Untuk guru, gedung dan fasilitas lainnya yang layak dikatakan bertaraf internasional. endingnya dapat diprediksi bahwa SBI tidak diperuntukkan bagi mereka yang miskin. Namun SBI hanya dapat diikuti oleh orang-orang kaya yang mempunyai uang banyak. Karena siswa di SBI akan diperlakukan secara khusus . jumlah siswa pada tiap kelas akan dibatasi antara 24 sampai 30 siswa dan kegiatan pembelajarannya menggunakan bilingual. (Martono: 2009) Kiranya program ini, hanya akan semakin mengerdilkan sistem pendidikan nasional sendiri. Karena, program ini pun akan semakin membuat jurang pemisah antara si-miskin dan si-kaya. Maka berlakulah logika pasar, yang miskin semakin miskin tidak bisa merasakan sekolah impian, yang kaya semakin kaya dan bisa merasakan segalanya. Padahal pendidikan berkualitas seharusnya bisa dinikmati oleh semua anak. Pemerintah hendaknya tidak mengabaikan tanggung jawab atas pendidikan, dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap anak Indonesia untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sesuai dengan amanat konstitusi.

Di era pendidikan yang serba cepat dan kapitalis ini, sekolah berlomba-lomba untuk menggapai predikat SRBI dan SBI, karena ini dipandang prestisius. Efektivitas program tersebut selalu saja menjadi pertanyaan di benak masyarakat. Seharusnya, pemerintah harus mempertimbangkan kembali terhadap wacana SBI dan SRBI sebelum mengimplementasikan lebih jauh, karena hanya akan mengerdilkan rakyat miskin. Bila pemerintah atau pengelola sekolah tetap memiliki keinginan yang kuat untuk membuka program SBI atau SRBI ini, tentu saja positif. Tetapi hendaknya seluruh sekolah di Indonesia ini dicanangkan untuk menjadi kelas bertaraf internasional, dalam arti kualitas, bukan hanya biaya.

Demikianlah beberapa catatan penulis tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam masalah pendidikan di Indonesia. Dampak dari kebijakan ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan mutu pendidikan di Indonesia.

Intervensi pemerintah dalam wilayah pendidikan sangat kuat dan sukar untuk dihindari.

KESIMPULAN

Dari uraian pada bagian pembahasan dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Sampai hari ini, sekolah merupakan lembaga yang dengan segala persoalannya masih merupakan pilihan utama dari sedemikian banyak pilihan untuk memperoleh pendidikan. Walau banyak kritikan dan keberatan yang tertuju kepada sistem lembaga pendidikan sekolah, namun kritikan dan keberatan tersebut sesungguhnya bukanlah ingin mengeliminir sekolah sebagai institusi yang menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan, namun kepada pengelolaannya.
2. Tidak dapat disanggah, bahwa berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa, membenarkan stigma bahwa sekolah benar dijadikan sebagai alat politik, walau pemerintah dengan segala argumentasinya berusaha untuk membantah penilaian ini.
3. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masalah pendidikan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembahasan, bersumber dari dua hal yaitu “kekuasaan dan keuangan” Setiap kebijakan yang ditetapkan bertendensi untuk memperkuat kedudukan. Selain itu semua kebijakan itu akhirnya berujung pada masalah pokok yaitu uang. Pendidikan gratis, adalah persoalan uang, ijazah untuk mencari pekerjaan adalah persoalan uang, mahalnya biaya sekolah juga karena uang, masalah penjualan buku karena uang, peluang masuknya modal asing juga karena uang.

DAFTAR BACAAN

Philip H. Coombs, *The World Crisis in Education*, (New York, Oxford University Press, 1985)

Everett Reimer, *Sekitar Eksistensi Sekolah sebuah Essay tentang Alternatif-alternatif Pendidikan*, Penyadur Prof. Drs. M. Soedomo, MA (Yogyakarta, PT. Hanindita, 1987)

Martono, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan: Upaya Mewujudkan Sekolah Berstandar Internasional Berbasis Potensi Lokal*, (Purwokerto: Jurusan Sosiologi FISIF Universitas Jenderal Soedirman, 2009)

M. Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo, 2010)

Teguh Wiyono, *Rekonstruksi Pendidikan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Benny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2005)

www.dapurpendidikan.com/pembelian-buku-pelajaran-kurikulum-2013.